

Nora Eka Putri / Kafa'ah : Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol.V No. 1 Tahun 2015

PENINGKATAN LITERASI POLITIK MELALUI KEBIJAKAN BERBASIS GENDER DI KABUPATEN SOLOK

Nora Eka Putri

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, UNP

Email: nora1putri@gmail.com

Abstract

Gender mainstreaming is an important thing to be considered in the development in Indonesia. One of the goals of gender mainstreaming in the field of politics is about the representation of women in parliament, political parties, and political literacy in men and women. The study found that political literacy in men and women in Solok, West Sumatra fairly evenly. This is evident from the results of the study show the level of political literacy of citizens Solok high at 71.6%, with the necessary political information indicators and strategies seek political information. Furthermore, a gender-based policy is needed in increasing the political literacy of society, especially women.

Keywords: *gender mainstreaming, politics literacy, information, policy*

A. Pendahuluan

Literasi politik merupakan aspek penting dalam proses demokrasi. Masyarakat tidak akan memahami demokrasi dan juga pemerintahan dengan baik jika belum memiliki pemahaman tentang isu-isu politik dan kegiatan politik. Fluktuasi tingkat partisipasi politik berbanding lurus dengan literasi politik, namun sejauhmana pengaruh literasi politik tersebut juga dipengaruhi oleh multi faktor sehingga tidak bisa berdiri sendiri sebagai aspek yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat.

Pemahaman yang paling penting tentang politik tentu yang terkait dengan pemahaman kebangsaan dan kenegaraan masyarakat. Disamping itu hal pokok yang juga harus dipahami oleh seluruh

lapisan masyarakat adalah mengenai pengetahuan tentang pemilu karena pemilu merupakan sarana dalam menyampaikan aspirasi politik masyarakat di negara yang menganut paham demokrasi.

Pemahaman masyarakat tentang literasi politik berbeda-beda tergantung jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan, lingkungan sosial budaya dan lain sebagainya. Indonesia sebagai negara yang masih kental dengan isu dan budaya paternalistik (marginalisasi kaum perempuan), menjadikan isu jenis kelamin sebagai salah satu penentu tingkat literasi politik masyarakat. Lebih jauh dapat dipahami bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki tingkat melek politik yang berbeda di Indonesia. Menurut data UNDP (2001) bahwa dari seluruh Negara ASEAN, Indonesia menempati peringkat terakhir untuk *Human Development Index (HDI)*, *Gender Related Development Index (GDI)* dan juga *Gender Empowerment Measure (GEM)*. Artinya SDM Indonesia perlu ditingkatkan dari berbagai bidang termasuk bidang politik (literasi politik). Dalam bidang politik, persentase anggota legislatif antara laki-laki dan perempuan jauh berbeda, persentase anggota legislatif perempuan hanya 8.8% (BPS Tahun 2000). Angka tersebut tidak sampai 30% dari keseluruhan anggota legislatif. Oleh sebab itu perlu diketahui tingkat literasi politik dan bagaimana pengarusutamaan gender dapat meningkatkan literasi politik masyarakat.

Salah satu daerah yang memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi adalah Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Solok. Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Solok adalah 75.01% (KPU Kabupaten Solok, 2014), untuk tingkat partisipasi pemilih angka tersebut dinilai cukup tinggi, namun literasi politiknya juga perlu diketahui apakah berbanding lurus atau berbeda? Bagaimana dengan faktor gender? Apa langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan literasi politik masyarakat yang berbasis gender? Tulisan ini merupakan hasil penelitian korelasional-deskriptif yang dilakukan dengan pendekatan campuran yakni metode eksplanatoris sekuensial yaitu penelitian dilakukan diawali dengan pengumpulan data kuantitatif kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif dan tahap

kedua menggunakan *teknik proportioned stratified random sampling* dengan menggunakan rumus Slovin, disamping itu untuk menghindari bias data juga dilakukan studi dokumentasi dari berbagai referensi yang terkait dengan keterkaitan pengarusutamaan gender terhadap tingkat literasi politik.

B. Literasi Politik dan Pengarusutamaan Gender

1. Literasi Politik

Menurut Bernard Crick (2006), literasi politik adalah pemahaman praktis tentang konsep-konsep yang diambil dari kehidupan sehari-hari dan bahasa, merupakan upaya memahami seputar isu politik, keyakinan para kontestan, bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. Singkatnya literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, keterampilan dan sikap mengenai politik (Bakti, 2012). Literasi politik dijelaskan oleh Jenni S Bev sebagai keterampilan yang diperlukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Muatan pokok literasi politik adalah:

a. Partisipasi politik

Partisipasi politik warga menurut Bakti (2012) dapat dibedakan atas beberapa kategori:

- 1) Dilihat dari kegiatannya, partisipasi politik aktif dan pasif. Dikatakan aktif apabila masyarakat tersebut terlibat aktif dalam perumusan kebijakan pemerintah. Sementara partisipasi politik pasif merupakan kegiatan yang mencerminkan ketaatan terhadap keputusan pemerintah
- 2) Dilihat dari tingkatannya, dibedakan menjadi apatis, spektator dan gladiator. Apatitis artinya tidak menaruh perhatian sama sekali terhadap kegiatan politik dan bersikap masa bodoh. Spektator maksudnya adalah warga yang bersangkutan terlibat atau ikut memilih dalam Pemilu. Sedangkan gladiator berpartisipasi secara aktif dalam proses politik
- 3) Partisipasi dibedakan atas jumlah, ada yang bersifat kolektif dan lainnya individual

- 4) Dilihat dari tinggi rendahnya partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif; partisipasi apatis (ada kepercayaan kepada politik namun kurang percaya pada system yang ada); partisipasi militan radikal (kepercayaan kepada politik tinggi namun percaya kepada system rendah); partisipasi tidak aktif (kesadaran politik rendah, tetapi percaya kepada system politik sangat tinggi).

b. Pemahaman kritis warga atas hal-hal pokok terkait politik

Pemahaman warga mengenai politik dan aspek aspek yang berhubungan dengan konsep negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan umum, pembagian dan alokasi merupakan hal pokok yang harus dipahami oleh warga untuk berpartisipasi aktif dalam politik.

Pendekatan mengenai literasi politik warga dikemukakan Bakti (2012) yaitu:

- 1) Kebutuhan terhadap informasi politik, terkait dengan informasi apa yang dibutuhkan untuk mengetahui secara jelas informasi tentang partai politik dan kandidat (pendidikan formal, karier, keluarga, visi misi, dll)
- 2) Menetapkan strategi pencarian, merupakan strategi investigasi terhadap seluruh proses politik misalnya sumber dana kampanye, tim sukses, pelanggaran prosedur kampanye, dll
- 3) Gerakan mengkomunikasikan informasi, terkait dengan peran media dalam proses publikasi. Ada baiknya jika media membuat asosiasi yang kuat untuk mengawasi pemilu sekaligus sebagai kekuatan penyeimbang. Misal meliput janji kampanye sehingga dikemudian hari masih ada bukti otentik tentang janji politik tersebut
- 4) Mengevaluasi produk dari proses akhir politik, terkait dengan evaluasi menyeluruh di setiap tingkatan kampanye Pemilu/Pemilu Kada. Masyarakat punya hak untuk mengevaluasi dan merekomendasikan apakah seorang kandidat layak atau tidak.

2. Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender tidak hanya berarti mengintegrasikan permasalahan gender sebagai aspek pembangunan tetapi juga upaya membuat program pembangunan lebih peka dan responsif gender. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mendefinisikan pengarusutamaan gender sebagai: proses penilaian terhadap dampak suatu kegiatan pembuatan peraturan, kebijakan dan program bagi laki-laki dan perempuan di semua tingkatan. Pengarusutamaan gender adalah strategi agar kebutuhan perempuan dan laki laki dapat diintegrasikan dalam perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi dari program yang dibuat sehingga perempuan dan laki-laki dapat memperoleh manfaat yang sama.

Menurut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, bahwa semua departemen termasuk birokrasi daerah harus menerapkan pengarusutamaan gender. Dalam realisasinya pengarusutamaan gender dilakukan melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Badan Pemberdayaan Perempuan di daerah. Adapun langkah yang dijadikan acuan dalam menerapkan pengarusutamaan gender dan peran perempuan dalam penentuan kebijakan (dalam Widayani S, 2005) adalah :

a. Perencanaan, pembuatan dan pelaksanaan

Tahapan perencanaan diperlukan data statistik yang terpilih menurut jenis kelamin. Data ini digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender dan menganalisa mengapa kesenjangan tersebut terjadi. Kebijakan kemudian dapat diformulasi ulang agar lebih peka pada kebutuhan perempuan. Tahapan selanjutnya diikuti dengan rencana kerja untuk mempersempit kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan. Data menjadi input utama terhadap analisa gender pada tahapan pembuatan kebijakan.

b. Penerapan

Penerapan program dan kebijakan yang responsif gender dapat bervariasi sesuai dengan kondisi setempat. Untuk memastikan bahwa

penerapannya akan sesuai dengan kebutuhan perempuan sebagaimana laki-laki keduanya harus dilibatkan dalam manajemen kegiatannya dan harus ada koordinasi antara *stakeholders* di semua tingkatan.

c. Partisipasi

Langkah ini antara lain mencakup:

- 1) Siapa yang menjadi target, apakah perempuan atau laki-laki dan perempuan
- 2) Siapa yang menjadi partisipannya
- 3) Siapa yang akan memperoleh manfaatnya

d. Manajemen

Jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam perencanaan proyek, pengorganisasian dan pengawasan adalah indikator partisipasi perempuan dalam manajemennya.

e. Pengawasan dan evaluasi

Langkah pengawasan dan evaluasi ini antara lain mencakup:

- 1) Pihak yang memberikan evaluasi harus membuat analisa kualitatif mengenai kebijakan atau program responsif gender
- 2) Pada tingkatan program atau kebijakan, pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan dengan menyusun indikator *output* yaitu data mengenai bagaimana laki-laki dan perempuan berpartisipasi dalam program atau kebijakan.
- 3) Ada kebutuhan indikator pengaruh yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin untuk menentukan apakah pengarusutamaan gender telah efektif mempersempit atau meminimalisasi kesenjangan gender.

Gambaran operasional penelitian tentang literasi politik, variabel dan indikator dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Variabel dan Indikator Penelitian:

Teori/Kerangka Konsep	Variabel	Indikator
Literasi Politik (Bernard Crick)	Informasi politik	- Kandidat (Pendidikan, pekerjaan,dll), partai politik, visi misi

	Strategi pencarian	- Informasi tentang profil parpol, sumber dana, kampanye, dll
	Mengkomunikasikan informasi	- Peran media massa dan media elektronik dalam publikasi informasi politik
	Evaluasi produk pada proses akhir politik	- Evaluasi terhadap tahapan Pemilu dan kinerja selama menjabat
	Pengaruh	- Pemilu mempengaruhi kebijakan - Pemilu adalah cara untuk eksistensi elit politik
	Perbandingan Partisipasi Pemilu dan Pilpres	- Keikutsertaan dalam Pemilu/ Pilpres - Alasan memilih dlm Pemilu/Pilpres - Manfaat Pemilu/ Pilpres bagi Pemilih

D. Pembahasan

Kabupaten Solok merupakan salah satu wilayah Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 14 kecamatan. Secara geografis wilayah ini masuk ke dalam kategori wilayah pegunungan dan perbukitan. Penduduk di wilayah Kab. Solok secara umum memiliki mata pencaharian petani dan pedagang disamping pekerjaan lain seperti PNS dan wiraswasta. Penduduknya termasuk penduduk yang homogen, jumlah etnis selain Minangkabau tidak terlalu signifikan sehingga hubungan kekerabatan dan social kemasyarakatan bersifat kekeluargaan dan harmonis. Karakteristik masyarakat di Kab. Solok relative sama dengan masyarakat di wilayah Sumatera Barat lainnya, namun karena masyarakat yang gigih dan dibatasi oleh berbagai wilayah yang berbeda, masyarakatnya cenderung terbuka dan mau menerima berbagai informasi dan masukan yang bermanfaat untuk kemajuan kehidupan ke depan.

a. Karakteristik Responden

Karakteristik responden dilihat dari jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, pekerjaan, status pernikahan, dan umur adalah : responden laki-laki berjumlah 35 orang dan perempuan berjumlah 65 orang yang keseluruhannya beragama Islam. Pendidikan terakhir, yang ditempuh oleh responden terdiri 24 orang lulus pendidikan dasar (SD/ sederajat), 28 orang lulus pendidikan SLTP/ sederajat, 32 orang

lulus pendidikan SLTA/ sederajat, 10 orang lulus perguruan tinggi dan 6 orang berpendidikan S-2 sebagaimana pada tabel 2 di bawah:

Tabel 2
Pendidikan Terakhir Responden

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	SD/ sederajat	24	24.00
2	SLTP/ sedrajat	28	28.00
3	SLTA/ sederajat	32	32.00
4	Perguruan Tinggi	10	10.00
5	Pascasarjana	6	6.00
	Total	100	100.00

Pekerjaan responden dari 100 orang, 31 orang bekerja sebagai petani, 6 orang pedagang, pegawai negeri 8 orang, pegawai swasta 4 orang, wiraswasta 29 orang, dan kategori lain-lain 22 orang (tukang ojek, buruh, ibu rumah tangga, pensiunan PNS dan tidak bekerja) sebagaimana tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Pekerjaan Responden

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1	Petani	31	31.00
2	Pedagang	6	6.00
3	Nelayan	0	0.00
4	Pegawai negeri sipil (ASN)	8	8.00
5	Pegawai Swasta	4	4.00
6	Wiraswasta	29	29.00
7	Lain lain	22	22.00
	Total	100	100.00

Status Pernikahan, dari 100 responden yang belum menikah 19 orang, menikah 78 orang, dan pernah menikah 3 orang (janda atau duda). Aapun umur responden sebanyak 21 orang berusia 17 - 25 tahun, 23 orang berumur 26 - 35 tahun, 38 orang berusia antara 36 - 60 tahun, dan 18 orang berusia di atas 60 tahun. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 4 di bawah:

Tabel 4
Umur Responden

No	Umur Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dibawah 17 tahun (pernah menikah)	0	0
2	17 - 25 tahun	21	21.00
3	26 - 35 tahun	23	23.00
4	36 - 60 tahun	38	38.00
5	Di atas 60 tahun	18	18.00
	Total	100	100.00

b. Total Capaian Responden (TCR)

Total capaian responden pada variabel literasi politik dapat diketahui dari tabel di bawah ini:

Tabel 5
Total Capaian Responden Variabel Literasi Politik

No	Indikator Variabel X (Literasi Politik)	Mean	TCR	N	Kategori
1	Informasi politik	2.97	74.44	583	Sedang
2	Strategi pencarian	2.73	68.37	583	Sedang
3	Mengkomunikasikan informasi	2.79	69.75	583	Sedang
4	Evaluasi produk pada proses akhir politik	2.92	73.00	583	Sedang
	Rata-rata Variabel X	2.85	71.40	583	Sedang

c. Uji T Test

Tabel 6
One-Sample Test

	Test Value = 75					
	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
					Lower	Upper
X	-1.618	99	.000	-72.13500	-72.2234	-72.0466

Berdasarkan hasil uji T-test diketahui nilai t variabel X adalah -1.618 sehingga $t_{hitung} < t_{tabel}$ (1.980) berarti H_0 diterima dan H_a ditolak. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi politik warga Kabupaten Solok (variabel X) paling tinggi $\geq 75\%$, Hal ini juga

dibuktikan dengan perhitungan tingkat literasi politik rata rata warga Kabupaten Solok sebagai berikut:

Rata-rata tingkat melek politik warga (x) adalah (jumlah skor variable x : skor ideal x 100%) = $4582 : 6400 \times 100\% = 71.6 \%$

Terkait dengan hasil di atas, perlu dilakukan sebuah rancangan kebijakan dalam rangka meningkatkan literasi politik masyarakat terutama yang berbasis gender sehingga angka 71.6% dapat mencapai di atas 80% dan ini juga berdampak positif bagi partisipasi politik perempuan.

3. Peningkatan Literasi Politik melalui Pengarusutamaan Gender

Peningkatan literasi politik melalui pengarusutamaan gender ditemukan persoalan perempuan baik dari aspek kultural maupun struktural. Aspek kultural, ajaran budaya yang membelenggu keterlibatan perempuan dalam wilayah publik seperti politik dan harus berkonsentrasi pada wilayah privat dan domestik rumah tangga. Budaya patriarki di Indonesia sangat mendominasi berbagai sendi kehidupan masyarakat sehingga perlu usaha ekstra untuk mendorong partisipasi perempuan dalam dunia politik dan persepsi perempuan itu sendiri yang menyatakan bahwa dunia politik adalah dunia laki-laki dan tidak cocok bagi perempuan. Aspek struktural, persoalan perempuan dalam bidang struktural cukup kompleks, dapat dilihat melalui, *pertama*: konstruksi sosial seksualitas, perbedaan jenis kelamin merupakan bentuk interaksi sosial yang tercermin pada nilai-nilai dalam masyarakat, adat, agama, dan negara. *Kedua*: maskulinitas politik, persetujuan bahwa dominasi kaum laki-laki terhadap ranah publik. *Ketiga*: marginalisasi kaum perempuan dalam dunia politik termasuk informasi politik

Agenda literasi politik melalui pengarusutamaan gender adalah:

- a. Kaum perempuan harus berani melakukan dekonstruksi berbagai teori tentang perempuan yang bias gender, selanjutnya melakukan rekonstruksi agar berbagai pandangan tentang peran perempuan

- terutama dalam bidang politik berwawasan keadilan dan kesetaraan gender,
- b. Upaya pemberdayaan perempuan, menanamkan kesadaran gender di kalangan perempuan itu sendiri dan peduli terhadap berbagai persoalan yang melingkupi mereka termasuk bidang politik. Dalam hal ini diperlukan kerjasama dengan berbagai lembaga misalnya lembaga pendidikan dan LSM,
 - c. Meningkatkan jaringan antar kelompok perempuan dari berbagai elemen,
 - d. Perempuan harus meningkatkan kemampuan dan keterampilan politik sehingga keterlibatan mereka di dalam bidang tersebut berpengaruh secara signifikan tidak hanya sekedar “pajangan”, dan aktivis perempuan jangan hanya peduli terhadap isu perempuan saja namun juga harus terlibat dalam persoalan lain baik social, budaya, ekonomi dan politik.

Agenda literasi politik perempuan di atas tidak dapat berjalan sendiri, oleh sebab itu diperlukan regulasi yang terkait dengan peningkatan literasi politik perempuan yang berbasis gender. Berbagai kebijakan pemerintah selama ini yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat masih didominasi oleh kebijakan atau peraturan yang dinilai bias gender. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan yang berbasis gender agar kepentingan seluruh masyarakat terakomodasi dengan baik. Menurut Naila Kabeer (1994) ada beberapa tahapan agar kebijakan pemerintah yang bias gender menjadi pro gender, yaitu:

- a. Kebijakan yang dinilai bias gender ditransformasikan secara langsung menjadi kebijakan yang netral gender ataupun melalui kebijakan spesifik gender.
- b. Kebijakan spesifik gender nantinya juga harus menjadi kebijakan pengontrol bagi kebijakan yang netral gender agar meminimalisasi bias implementasi dari kebijakan yang netral gender yang secara efektif dilakukan dengan mempertahankan maupun menyempurnakan kebijakan spesifik gender.

Lebih lanjut kebijakan yang mengutamakan gender (pengarusutamaan gender) dapat dilihat melalui beberapa langkah

yang juga telah disinggung pada bagian tinjauan pustaka. Adapun langkah dalam peningkatan literasi politik melalui pengarusutamaan gender adalah:

- a. Perencanaan, pembuatan dan pelaksanaan
Melalui penelusuran data statistic terkait keterlibatan perempuan di Kabupaten Solok dalam bidang politik dan pemerintahan. Hal ini bisa dilakukan bersama sama antara pemerintah daerah dengan BPS dan KPU Daerah.
- b. Penerapan
Penerapan kebijakan yang nantinya sesuai dengan target dan sasaran untuk meningkatkan literasi politik perempuan di Kabupaten Solok.
- c. Partisipasi
Siapa yang menjadi target, kemudian bagaimana seharusnya keterlibatan perempuan dalam kebijakan tersebut dan apa manfaat yang diperoleh.
- d. Manajemen
Pengorganisasian dan pengelolaan peran perempuan dalam kebijakan sehingga terlihat bagaimana partisipasi perempuan tersebut
- e. Pengawasan dan Evaluasi
Pihak yang memberikan evaluasi harus membuat analisa yang jelas dan mendalam pada kebijakan yang responsif gender tersebut, jika masih terdapat kelemahan dapat dicarikan solusi agar partisipasi perempuan dalam kebijakan meningkatkan literasi politik menjadi lebih baik dan optimal.

E. Penutup

Tingkat literasi politik warga Kabupaten Solok dalam Pemilu/Pemilu Kada dapat dinyatakan cukup baik dengan tingkat capaian responden 2.85 dengan skala 4 dan tingkat melek politik berada pada angka 71.6%. Tingkat literasi politik ini seharusnya mencapai angka 80%, di antara solusi yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan literasi politik perempuan. Kemudian lebih

lanjut, dirancang sebuah kebijakan yang berbasis gender dalam meningkatkan literasi politik perempuan.

F. Referensi

- Agustino, Leo. 2014. *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Aminah, Siti. 2014. *Kuasa Negara pada Ranah Politik Lokal*. Jakarta: Kencana.
- Widyani, S Ani. 2005. *Politik Perempuan bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas.
- Bakti, Andi Faisal. 2012. *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Churia Press.
- Harrison, Lisa. 2009. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta: Kencana
- Heywood, Andrew. 2014. *Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Husein, Harun. 2014. *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding*. Jakarta: Perludem.
- Jumiati. 2014. *Jurnal Tingkap* Vol.X No 2, Oktober.
- Kartono, Kartini. 2009. *Pendidikan Politik Sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nora Eka Putri. 2011. *Jurnal Tingkap* Vol.VII No 1, April. "Segmentasi Politik Pemilih Pasangan Pemenang Pemilu Kota Padang Tahun 2008".
- Riant Nugroho. 2008. *Gender dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rush Michael, dkk. 2003. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Saryono, Haryadi, dkk. *SPSS vs Lisrel sebuah Pengantar Aplikasi untuk Riset*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti Hriti Sasrini. 2009. *Gender and Politics*. Yogyakarta: Tiara Wacana PSW UGM.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Laporan KPU Kabupaten Solok Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014.

Laporan KPU Kabupaten Solok Penyelenggaraan Pemilu Presiden Tahun 2014.